

Tingkat Kepatuhan LHKPN Luwu Timur Sudah 100 %

Suhardi - LUWUTIMUR.INDONESIASATU.CO.ID

Apr 2, 2021 - 10:49

Nama Instansi	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan (%)	Tepat Waktu	Terlata
	3261	3261	0	100,00%	3261	
	327	327	0	100,00%	327	
AN SELAYAR	230	230	0	100,00%	230	
TARA	293	293	0	100,00%	293	
NG	237	237	0	100,00%	237	
	174	174	0	100,00%	174	
	229	229	0	100,00%	229	
	5183	5183	0	100,00%	5183	
	146	146	0	100,00%	146	
NG RAPPANG	205	205	0	100,00%	205	
	33	33	0	100,00%	33	
	247	247	0	100,00%	247	
ELATAN	53	53	0	100,00%	53	
	127	127	0	100,00%	127	
	83	83	0	100,00%	83	
MUR	300	300	0	100,00%	300	
ABA	212	212	0	100,00%	212	
JENE DAN KEPULAUAN	822	821	1	99,88%	821	
NG	319	317	2	99,37%	317	
RAJA	250	247	3	98,80%	247	
	261	257	4	98,47%	257	
JTARA	276	269	7	97,46%	269	
	36	31	5	86,11%	31	
ITO	203	153	50	75,37%	153	
	231	174	57	75,32%	174	

LUWU TIMUR - Tingkat kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kabupaten Luwu Timur sudah 100 persen alias tuntas.

Hal ini disampaikan oleh Admin pengelola LHKPN Kabupaten Luwu Timur, Yerislin Wuala yang dikonfirmasi via ponselnya, Jumat (02/04/2021).

Menurut Yeris, LHKPN Luwu Timur sudah rampung 100 persen pada 31 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, berarti masih belum melewati deadline yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Iya, jadi LHKPN Lutim sekitar pukul tujuh malam tanggal 31 Maret 2021 kita sudah rampungkan karena hanya tersisa satu orang lagi yang diupload, yang pasti LHKPN Lutim sudah rampung 100 persen sebelum batas waktu dari KPK,” terang Yeris.

Sementara dari tabel Admin LHKPN KPK juga terlihat bahwa untuk Kabupaten Luwu Timur dari 300 wajib lapor LHKPN seluruhnya sudah melaporkan dengan tepat waktu atau tingkat kepatuhan terhadap LHKPN mencapai 100%.

Terkait pelaporan LHKPN ini, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Luwu Timur, Masdin mengharapkan agar kedepannya seluruh wajib LHKPN agar bisa melaporkannya lebih awal karena ini merupakan kewajibannya sebagai penyelenggara negara sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

“Semoga kedepannya seluruh wajib LHKPN bisa melaporkan lebih awal sebelum deadline KPK,” harap Masdin. (JIS)